

## DKP Kembalikan Duit Hasil Operasi Bersama



ABDU SYUKRI

Gatot Rudyono.

PONTIANAK. Pasca temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalbar mengembalikan uang hasil operasi bersama sebesar Rp 128 juta plus bunga ke kas daerah.

"Uang itu pendapatan penanganan operasi bersama sebanyak Rp 128 juta yang merupakan akumulasi pendapatan tahun 2008 hingga 2010. Pada saat itu," kata Gatot Rudyono, Kepala DKP Kalbar kepada sejumlah wartawan usai menghadiri rapat di kantor DPRD Kalbar, Senin (1/8).

Menurut dia, sekretaris DKP sempat melakukan koordinasi dengan Dispenda Kalbar untuk melakukan pembayaran. "Namun kata Dispenda ketika itu, untuk pembayaran masalah itu belum ada," kata Gatot

■ Halaman 7

## DKP Kembalikan

.... dari halaman 1

Seolah tak mau disalahkan, Gatot buru-buru menjelaskan dirinya baru menjadi Kepala DKP pada 2010. Sementara dana yang menjadi temuan BPK itu, sudah berlangsung sejak tahun 2008. Mendengar masih adanya temuan BPK itu, Gatot meminta kepada stafnya untuk segera menyetorkan uang tersebut ke kas Negara (pemda).

"Uang itu sudah kami setorkan ke kas Pemda, sekaligus bunganya sudah kami kembalikan. Dan hal ini sudah dianggap selesai," kata Gatot.

Menurutnya, sekretaris yang menyimpan uang di rekening pribadinya tersebut tidak lagi menjabat sebagai sekretaris DKP. "Sudah pindah tugas di instansi lain," katanya tanpa menyebutkan nama maupun sekretaris dimaksud.

Gatot juga enggan bicara

kemana mantan sekretaris itu pindah. Ia bahkan tidak memberikan sanksi kepada sekretaris yang teledor itu. "Mengenai sanksi, saya tidak tahu. Hal itu merupakan wewenang pimpinannya. Sekarang ia bukan lagi menjabat sebagai sekretaris DKP, sudah pindah," tukas Gatot.

Seperti diketahui, BPK Perwakilan Kalbar memberikan beberapa catatan dalam laporan keuangan Pemprov Kalbar.

Di DKP Kalbar, BPK menemukan pendapatan tidak disetor ke kas daerah tapi terlebih dahulu disimpan ke rekening pribadi sekretaris dinas. Hal tersebut berlangsung sejak 2008 sampai 2010, dengan jumlah nilai Rp 128 juta.

Temuan itu, diketahui baru disetorkan ke kas daerah pada tahun 2010. Padahal uang itu

merupakan pendapatan daerah yang harus terus disetorkan secara rutin tiap tahun anggaran.

BPK mengharapkan agar tidak terulang kembali adanya pejabat yang menyimpan keuangan daerah di rekening pribadi, yang seharusnya disetorkan ke kas daerah.

BPK meminta gubernur melakukan tindakan tegas terhadap pejabat yang menyimpan uang pendapatan daerah di rekening pribadi, bukan kas milik daerah.

Tindakan, tidak hanya kepada pejabat bersangkutan. Atasan sang pejabat tersebut juga perlu mendapatkan sanksi, sebab BPK mengindikasikan bisa saja ada keterkaitan antara pejabat bawahan dengan atasan atau pimpinan SKPD-nya. (bdu)